

Komnas HAM dan LHKP PP Muhammadiyah gelar FGD Bersama Aktivis Pembela HAM

Kamis, 10-11-2023



FOCUS GROUP DISCUSSION

Diseminasi Tim Pemenuhan HAM bagi Para Pembela HAM (Tim HRD) dan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia (SNP 6/2021)

**Aula Gedoeng PP Muhammadiyah Yogyakarta
9-11 November 2023**



Yogyakarta, 10 November 2023 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Diseminasi Tim Pemenuhan HAM bagi Para Pembela HAM (Tim HRD) dan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia (SNP 6/2021)." Acara ini akan berlangsung di aula Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.

FGD ini menjadi ajang penting dalam meningkatkan pemahaman dan koordinasi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upaya pemenuhan HAM di seluruh Indonesia. Tim Pemenuhan HAM (Tim HRD) memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa HAM dihormati dan dilindungi di berbagai sektor kehidupan.

Selain itu, dalam FGD ini, akan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia (SNP 6/2021). SNP 6/2021 adalah regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab pembela HAM, serta menjadi panduan utama dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Peserta FGD akan terdiri dari para pembela HAM, aktivis, akademisi, dan praktisi hukum yang berkomitmen dalam mengawal HAM di Indonesia. Diskusi akan mencakup peran Tim HRD, tantangan yang dihadapi, serta pengenalan dan pemahaman lebih dalam tentang SNP 6/2021.

Pembicara dalam FGD ini adalah para ahli di bidang HAM dan hukum yang akan membagikan pengalaman dan wawasan mereka. Diskusi mendalam akan mengupas berbagai aspek penting terkait pemenuhan HAM dan peran strategis para pembela HAM dalam mencapainya.

Dengan mengadakan FGD ini, diharapkan para pembela HAM akan semakin memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang regulasi terkini yang mengatur pekerjaan mereka. Dengan begitu, mereka dapat lebih efektif dalam memastikan pemenuhan HAM di Indonesia.

"FGD ini menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya pemenuhan HAM di Indonesia dan memastikan bahwa para pembela HAM siap menghadapi tantangan-tantangan advokasi yang semakin kompleks dan massif " ujar David Effendi selaku Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah. [FIS]